

Manuver Kebijakan Pembangunan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Pasca Pandemi

Penulis (Antin Nurvidia Astuti)¹, Penulis (Aryadea Reza Fahlevi)², Penulis (Mahira Wijaya Bakti Artadi)³, Penulis (Robby Darwis Nasution)⁴, Penulis (Shandy Prabowo)⁵

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, antinurvidi26@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, aryareza696@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sinyoartadi@gmail.com
4. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, darwisnasution69@gmail.com
5. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, shanprabowo@gmail.com

Abstract

The Corona virus that originated in Wuhan, China at the end of 2019 had a tremendous effect on the development and stability of the country. In response to the Corona Virus pandemic, countries around the world have adopted social distancing and physical distancing policies. The policy reduces the activities of people in the world. Several countries have implemented lock down policies and some have implemented Large-Scale Social Restrictions. With the enactment of this policy, some companies and industries are prohibited from operating, so that the economic losses are quite large. The author tries to describe the transition of development in the era of the pandemic. An interesting theme to study, because the process of economic recovery in the midst of a crisis is a necessity. The author uses a qualitative descriptive method with a content analysis technique approach and literature study. In this study, the government implements development policies in the form of accelerating economic recovery, social reform, industrial recovery, tourism, and national health. In government management in the new normal, the COVID-19 pandemic has a long-lasting effect on national development and the stability of a country, so the government enforces development policies.

Keywords: Pandemic, Governance, Development, Policy, Government

Abstrak

Virus Corona berasal dari Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019 memberikan efek luar biasa bagi pembangunan dan kestabilan negara. Merespon pandemi Virus Corona, negara-negara di dunia mengambil kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Kebijakan itu menurunkan aktivitas orang di dunia. Beberapa negara melakukan kebijakan *lock down* dan sebagian melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Diberlakukannya kebijakan itu, sebagian perusahaan dan industri dilarang beroperasi, sehingga kerugian ekonomi cukup

besar. Penulis berusaha menggambarkan transisi pembangunan di era pandemi. Tema menarik untuk dikaji, karena proses pemulihan ekonomi ditengah krisis adalah keniscayaan. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis isi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, pemerintah memberlakukan kebijakan pembangunan berupa percepatan pemulihan ekonomi, reformasi sosial, pemulihan industri, pariwisata, dan kesehatan nasional. Dalam pengelolaan pemerintah dimasa new normal, pandemi covid-19 memberikan efek panjang bagi pembangunan nasional dan kestabilan suatu negara sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan pembangunan.

KataKunci: Pandemi, Governance, Pembangunan, Kebijakan, Pemerintah

1. Pendahuluan / Introduction

Wabah virus corona yang berasal dari Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019 memberikan efek yang luar biasa bagi pembangunan nasional dan kestabilan setiap negara. Merespon pandemi Virus Corona tersebut, Negara-negara di dunia mengambil kebijakan dengan menerapkan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial) dan physical distancing (jaga jarak antar orang). Kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan masyarakat di kota-kota besar di seluruh dunia. Beberapa negara melakukan kebijakan lock down dan sebagian melakukan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan diberlakukannya PSBB tersebut, maka sebagian besar perusahaan dan industri dilarang beroperasi , sehingga menyebabkan kerugian ekonomi cukup besarnya. Sektor ekonomi yang menjadi salah satu sektor yang mendapatkan dampak yang paling mengerikan. Tindakan yang dilakukan oleh para pimpinan dunia menyebabkan berbagai krisis dan kelesuan global, mulai dari berhentinya kegiatan perdagangan ekspor dan impor, lesunya beberapa industri, sampai ancaman pengangguran yang meningkat sebab hilangnya peluang lowongan kerja dimasa pandemi Covid 19.

Kebutuhan anggaran guna menangani virus covid 19, mulai dari bidang kesehatan, hingga agenda pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pembangunan berkala tempat wisata serta upaya pemberdayaan masyarakat juga terus meningkat. Pemerintah setidaknya sudah tiga kali mengganti proyeksi kebutuhan pembangunan dalam menangani virus covid 19 pada rentang waktu satu tahun ini. Sampai kini wacana yang dilontarkan pemerintah lebih memfokuskan pada tambahan belanja,

padahal peningkatan belanja harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara. Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus tetap ditingkatkan agar mempercepat laju pemulihan ekonomi. Hal tersebut terpampang nyata dari usaha pemerintah dalam memulai kembali mobilitas masyarakat, sehingga dalam berbagai sektor kehidupan, ekonomi, sosial dan budaya yang sebelumnya mengalami stagnasi bisa kembali beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, pemerintah menerbitkan kebijakan pembangunan berupa percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, percepatan pemulihan sektor Industri, sektor pariwisata, investasi, sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

Tulisan ini berusaha menggambarkan *governance covid 19 transition* dalam pembangunan di era pandemi virus corona. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena proses pemulihan ekonomi di tengah krisis adalah suatu keniscayaan. Penelitian ini berfokus pada perubahan arah berbagai kebijakan pembangunan pemerintah dalam rangka menghadapi efek samping yang ditimbulkan dari kebijakan sebelumnya dalam mengurangi persebaran virus covid 19 ialah dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

2. Metode / Method

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi dan studi pustaka sebagai pendekatannya. Teknik *content analysis* adalah metode penelitian yang dipakai untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain analisis isi yaitu metode penelitian yang ingin mengungkapkan pemikiran penulis yang termanifestasi ataupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini memakai jenis dan sumber data skunder yang didapatkan dari hasil penelitian, buku-buku dan artikel referensi yang mengulas bahasan yang sesuai dengan tema (Iskandar, 2019).

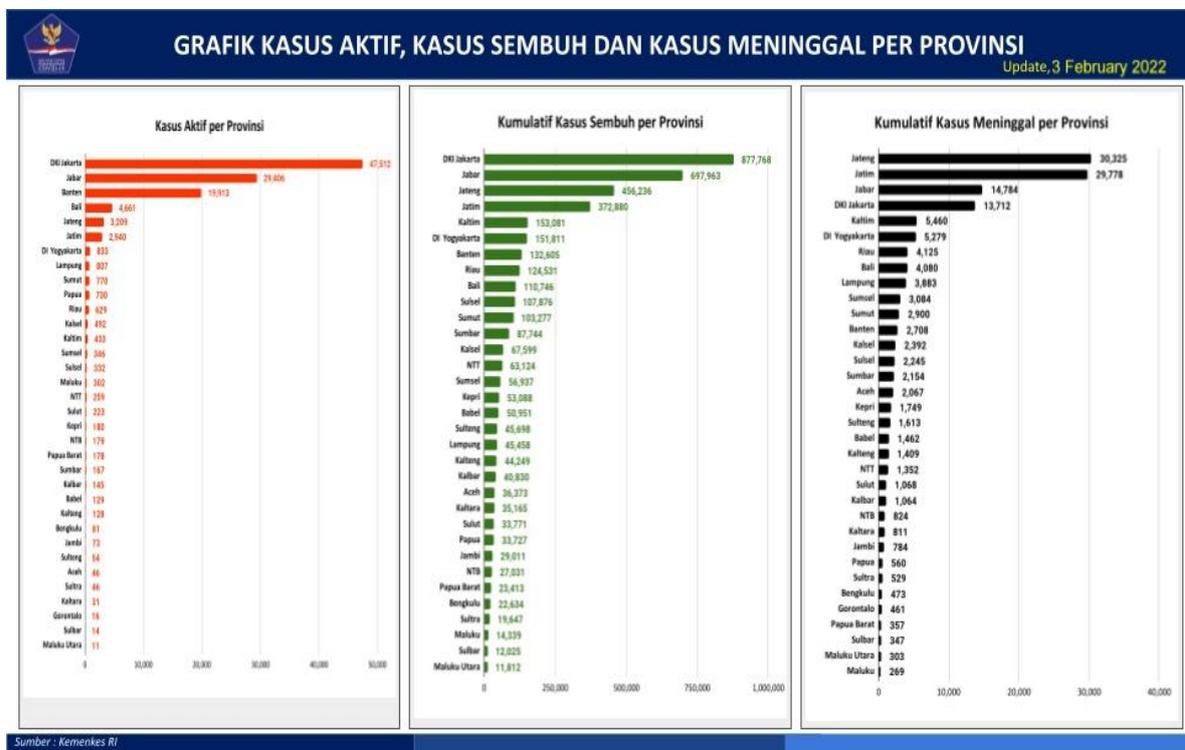
3. Studi Kepustakaan / Literature Rivew

1. Buku saudara Achmad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, 2018. Dengan judul “ Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam mencapai kemandirian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah

(PAD) menjadi salah satu instrumen fisik yang tidak bisa dihilangkan dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2. Jurnal saudara I Ketut Kasna, 2021. Dengan judul “Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi”. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa efek dari pandemi ini sangatlah besar sehingga pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan ekonomi dan kembali ke amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu Usaha bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.

4. Hasil dan Pembahasan/Result and Discussion



Gambar 1. Grafik Kasus Aktif, Kasus Sembuh, Dan Kasus Meninggal Per Provinsi, 3 February 2022

Berdasarkan gambar yang diunggah oleh Kemenkes RI, tanggal 3 Februari 2022 lalu, dapat kita ketahui bahwa kasus Pandemi covid 19 di setiap provinsi di Indonesia masih terbilang tinggi. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh perilaku masyarakat Indonesia yang sudah mulai abai terhadap peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah dirasa cukup untuk menangani masalah pandemi ini, sedangkan pada realita dilapangan jumlah masyarakat yang telah divaksin belum memenuhi target yang dibuat oleh pemerintah. Perilaku abai dari masyarakat inilah yang kemudian menjadi momok bagi pemerintah dalam menuntaskan kasus persebaran covid 19. Beberapa kasus yang

ditemui akhir-akhir ini justru diidentifikasi sebagai mutasi virus covid 19 yang lebih ganas, yang bernama omicron. Varian baru inilah yang perlu kita waspadai lebih lanjut. Hal ini dikarenakan vaksin yang kita peroleh bukanlah vaksin untuk varian yang baru ini. Oleh karena itu kita perlu bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka menangani persebaran virus covid 19 varian omicron ini agar segala masalah yang menyertainya juga segera teratasi. Pemerintah memprediksi tingkat lonjakan kasus varian baru Omicron pada akhir Februari ini perlunya juga ada pemikiran terobosan baru agar rantai penyebaran virus Omicron dapat dikendalikan, pemerintah juga telah berupaya menegakkan disiplin protokol kesehatan yang mana dapat dicontohkan pada yang dilakukan oleh lembaga Polri, yang mana tiap-tiap polres di Indonesia telah melakukan Operasi Yustisi atau penerapan protokol kesehatan dan pemberian masker.

A. Tantangan Pemerintah di era Pandemi

Pandemi Covid-19 memberikan efek besar bagi semua masyarakat Indonesia, pada kondisi pandemi saat ini Pemerintah Indonesia tengah dihadapkan tantangan yang besar adapun tantangan yang dihadapi Pemerintah ialah :

1. Lapangan Kerja

Banyak dari Perusahaan besar di Indonesia mengalami penurunan Laba sehingga membuat Perusahaan tersebut bangkrut atau gulung tikar oleh karenanya banyak dari perusahaan tengah memutuskan kontrak karyawannya sebab tidak sanggup lagi memberikan hak Gaji, dengan demikian pada akhirnya membuat tingkat pengangguran semakin luas. Penurunan laba ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan bekerja dari rumah beberapa bulan lalu akibat tingginya kasus persebaran virus covid 19.

2. Tingkat angka kemiskinan bertambah

Pada poin kedua ini pemerintah disungguhkan dengan masalah kemiskinan yang bertambah dan mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19, mengukur dari data Badan Pusat Statistik total jumlah penduduk yang berada dikategori miskin meningkat pada angka 9,78 % atau sebanyak 26,42 juta penduduk Indonesia. Hal ini merupakan PR yang cukup besar bagi pemerintah. Angka kemiskinan akan terus bertambah jika pemerintah tidak terampil dalam membaca peluang dan menganalisis ancaman perekonomian negara. Ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin

hak-hak warga negaranya.

3. Neraca Pembayaran

Pada point ini menjelaskan bahwa permasalahan pembayaran pada neraca yang dihadapi pemerintah setiap tahunnya, menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami minus hingga akhir 2020. Walaupun penurunannya tak separah pada yang dialami ketika kuartal I dan II tahun ini.

Pentingnya pengoptimalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada keadaan seperti ini, dengan maksud agar pemerintah dapat terbantu dengan adanya stimulus baru ini sehingga dapat membuka lowongan maupun lapangan pekerjaan yang banyak bagi warganya. UMKM merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja, bahwa mereka berperan dalam peningkatan ekonomi dan pelestarian mata pencaharian, pada saat UMKM naik maka ekonomi indonesia dapat keluar dari keadaan krisis ini dan perekonomian dapat segera pulih kembali. (Dian Ihsan, Kompas.com, *Prasmul 3 tantangan besar Pemerintah di pandemi Covid-19*, 2020). UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak pada Covid-19 ini, seperti yang diketahui dan dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa setidaknya ada 949 laporan warga sipil selaku pemilik Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mendapat imbas atau dampak dari Covid-19. Disaat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa yang mana dari Offline menjadi ke Online, para pelaku UMKM pasti mengalami ketergangguan karena mengalami kesulitan dalam mencapai target mereka disaat seperti ini, perubahan pola ini seyogyanya juga diikuti oleh para pelaku UMKM agar dapat survive bersaing pada roda perekonomian di Indonesia, sehingga bisa berkembang mampu menghadapi kondisi penerapan New Normal.

Adapun pemahaman teknologi dari pelaku bisnis Usaha UMKM terbatas karena sebagian pelaku sudah pada lanjut usia serta pada beberapa daerah pelosok mengalami keterbatasan akses jaringan internet, kendala seperti ini pemerintah juga diharapkan dapat terjun berperan turun kebawah mengambil langkah permasalahan ini dan memberikan jalan keluaranya, proses produksi dan akses pasar daring yang masih dinilai belum maksimal, oleh karenanya konsumen masih merasa belum aman untuk menjalankan proses pelayanan transaksi digital. (shinta carolin, *perjuangan membangkitkan UMKM lokal dikala pandemi*, umsida)

B. Kebijakan Pembangunan

Pemerintah telah menjalankan beberapa program baik reguler hingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar mampu mempertahankan diri dari efek negatif pandemi Covid-19. Akan tetapi, setelah pandemi juga tetap dibutuhkan rencana lebih lanjut untuk mengawal dan mendorong pembangunan secara kontinu. Pemerintah harus selalu menganalisis setiap masalah-masalah yang timbul sehingga harapannya proses aktualisasi PEN selalu bisa diakselerasikan sesuai dengan keadaan dan kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi. Harapannya agar mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan alokasi pembelanjaan anggaran, baik secara regular ataupun melalui Program PEN,” jelas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada webinar Asian Development Bank (ADB) dengan judul “Sustainable Post Pandemic Recovery”, di Jakarta, Kamis (24/06).

Program PEN merupakan trobosan yang tepat bagi bangsa ini, pasalnya masalah ekonomi menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi masyarakat. Beberapa dari golongan masyarakat justru lebih takut kehilangan nyawa akibat tidak makan dibandingkan dengan terinfeksi virus corona. Percepatan PEN ini pasti mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, utamanya di wilayah perkotaan yang mana masyarakatnya sebagian besar merupakan mantan buruh pabrik dan pekerja serabutan yang diberhentikan oleh PT akibat kebijakan WFH. Dalam realisasi program PEN ini tentu diperlukan infrastruktur yang memadai.

Dalam membangun infrastruktur, pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan alam agar pembangunan yang dilakukan bisa selaras dengan lingkungan, agar pembangunan bisa seiring dengan capaian capaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan ini yang kemudian menjadi salah satu cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan negara akibat krisis yang menyerang beberapa sektor pemerintahan. Tak bisa dipungkiri, pandemi Covid 19 ini memang telah mengobrak-abrik rencana pembangunan nasional dan daerah. Alokasi APBN banyak dilakukan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki pemerintahan demi kelangsungan kehidupan warga negaranya serta menjaga kestabilan politik. Kebijakan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga keadilan, meningkatkan mutu lingkungan hidup, dan

terselenggaranya tata kelola yang cakap dalam menjaga peningkatan mutu dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kita juga sudah mendeteksi adanya modernisasi teknologi digital yang memungkinkan terciptanya infrastruktur cerdas, sehingga mampu memaksimalkan fungsi infrastruktur yang sudah selesai maupun tengah dibangun. Pemanfaatan teknologi digital juga sudah terbukti mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang telah dimiliki, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi biaya operasional pengadaan infrastruktur," Tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Perkembangan dunia digital ini juga harus segera dikuasai oleh seluruh elemen masyarakat, hal ini bertujuan agar segala bentuk program pemerintah dapat kita suport dan awasi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pro pemerintah. Selain itu, dunia digital kemudian menjadi sangat penting karena dalam masa pandemi ini segala bentuk kegiatan dilakukan secara daring. Dunia digital menyajikan segala bentuk kemudahan dalam interaksi sosial.

Pemerintah kini juga telah menyiapkan program gagasan baru dari segi reguler maupun Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga dapat bertahan menghadapi dari dampak negatif pandemi Covid -19. Namun juga tetap perlu ada gagasan baru untuk menjaga mengelola maupun mendorong pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah saat ini sedang dalam menangani dari sisi kesehatan dan sisi segi ekonomi dengan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mana telah dilakukan sejak 2020 lalu. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 699,43 trilliun untuk pembiayaan pada bidang kesehatan, dukungan UMKM dan padat karya/prioritas lainnya , program perlindungan sosial. Hingga Juni 2021, telah terealisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencapai angka Rp. 226,63 trilliun atau 32,4 % dari total anggaran yang diberikan. Pemerintah juga harus terus menerus memonitor kendala apa yang terjadi atau muncul di program Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga nantinya proses realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional dapat bisa terus diterapkan secara akselerasi menyesuaikan situasi kondisi pandemi yang terus berubah-ubah atau dinamis, yang mana dapat bertujuan untuk mendorong akses pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran, baik secara regular maupun melalui Pemulihan

Ekonomi Nasional, untuk dapat membantu kalangan para pelaku pengusaha khususnya pada sektor UMKM, pemerintah juga telah memberikan refleksi atau realisasi pembayaran pinjaman, bantuan usaha modal kerja, bantuan terhadap pembelian barang dan jasa produksi karya dalam negeri serta pada produk UMKM, subsidi bunga melalui bantuan KUR (kredit usaha rakyat), perekonomian Indonesia diperkirakan akan pulih pada di pertengahan tahun 2021 dan akan tumbuh di kisar 4,5% - 5,3 % . (ekon, *pasca pandemi, perlu gagasan baru untuk menjaga dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan*. 2021).

C. Reformasi Sosial

Reformasi sosial yaitu seluruh bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang berpengaruh terhadap sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Dalam hal ini berbagai reformasi sosial dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari eksternal dan faktor dari internal. Faktor dari eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh segala sesuatu yang berasal dari luar subjek yang berubah, contohnya ialah perubahan iklim dan kondisi geografis, kebijakan pemerintah dan sebagainya, sedangkan faktor dari internal biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan pelakunya, misalnya kecenderungan untuk menyendiri, bersosial atau semacamnya. Di era pandemi covid 19 ini, kedua faktor yang disebutkan diatas sangatlah mempengaruhi reformasi sosial utamanya di Indonesia, reformasi sosial ini mengubah segala bentuk kebudayaan yang telah ada. Covid 19 memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial. Dampak positif adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu ialah munculnya budaya hidup sehat seperti rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, mengurangi kerumunan yang tidak memiliki manfaat yang jelas serta tumbuhnya ekonomi kreatif. Sayangnya reformasi sosial akibat pandemi covid 19 ini juga membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial yaitu meningkatnya sifat individualisme dalam masyarakat. Akibatnya banyak terjadi kegagalan dalam berkomunikasi yang kebanyakan dialami oleh pelajar dan mahasiswa.

D. Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pariwisata dan UMKM

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata

Pembangunan tempat wisata memiliki tujuan untuk memberikan laba bagi

wisatawan maupun komunitas yang mengelola. Dengan diadakannya pembangunan pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui laba secara ekonomi yang dibawa ke daerah tersebut. Dengan kata lain pembangunan pengembangan pariwisata ini harus mendapatkan suport pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana, sehingga wisatawan dan masyarakat setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut harus memperhatikan beberapa nilai, mulai dari nilai budaya, sejarah hingga ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir permasalahan (Mill 2000:168). Pengembangan pariwisata secara mendasar harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

- (1) pengembangan pariwisata berkelanjutan,
- (2) pembangunan wilayah terpadu dan pengembangan produk wisata,
- (3) pengembangan lingkungan, dan

(4) pembentukan ekonomi pariwisata. Sebagai contoh dampak pandemi covid 19 ini ialah Daerah Wisata Telaga Ngebel, Ponorogo. Menurut camat Ngebel kabupaten Ponorogo, Yusub Dharmadi wisata telaga ngebel tutup sementara waktu selain itu tutupnya wisata ngebel berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Pandemi virus covid 19 membawa krisis multi dimensi di banyak negara di dunia. Bank Dunia memprediksikan bahwa kemiskinan ekstrem akan meningkat hingga 150 juta orang ditahun 2021, karena pandemi Covid-19 (World Bank,2020c). Jurang kesenjangan pendapatan antara si miskin dan si kaya sendiri sudah menampilkan peningkatan, bahkan sebelum pandemi Covid-19 berlangsung (Department of Economic and Social Affairs, 2020, hlm. 3–4). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa golongan rentan yang paling terimbas dari semakin parahnya kesenjangan ini ialah anak-anak dan perempuan.

Pandemi Covid-19 juga terindikasi akan menghapus capaian kemajuan dalam pembangunan sumber daya manusia yang telah diusahakan beberapa tahun sebelumnya. Pemerintah seluruh negara di dunia tengah menghadapi rintangan yang lengkap karena tak hanya harus berhadapan dengan meningkatnya jumlah kemiskinan tetapi juga ancaman kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan daerah pariwisata harus mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah agar percepatan ekonomi atau pendapatan asli daerah segera menutupi kebutuhan yang membengkak

pasca pandemi.

2. Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui sektor UMKM

Berbeda dengan perekonomian di negara lain yang mengandalkan sektor ekspor, perekonomian dalam negeri masih diuntungkan lantaran mengandalkan sektor domestik. Oleh sebab itu, Andreas Eddy Susetyo, anggota Komisi XI DPR RI berpendapat bahwa penerapan new normal sebagai pemulihan ekonomi ialah pilihan yang benar. Akan tetapi, sejumlah sektor perlu memperoleh perhatian khusus, seperti sektor UMKM yang mempunyai kemampuan menyerap hingga 89,2 persen tenaga kerja, serta berkontribusi sebanyak 59,4 persen terhadap PDB. Pemulihan sektor UMKM akan menjadi sektor kunci sukses dalam pemulihan sektor riil. Skemanya dengan subsidi bunga, penempatan anggaran, penjaminan sebagai modal kerja, insentif pajak, dan sebagainya, jadi telah banyak cara. Agar penerapan pemulihan ekonomi dapat dikerjakan dengan tepat dan cepat. Meluasnya defisit pada APBN yang terjadi sekarang ini adalah konsekuensi dari tambahan belanja yang digunakan dalam program pemulihan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, perhitungan harus dilaksanakan dengan tepat dan teliti serta yang tidak kalah pentingnya ialah dengan memulai penetapan *threshold* atau ambang batas. Dengan demikian defisit APBN diharapkan dapat teratasi dan mampu melangkah kearah yang lebih baik.

Tabel

Tabel alokasi APBN 2021

No	Arah alokasi APBN	Jumlah/banyak
1.	Program social safety net	Rp 203,9 triliun
2.	Dukungan UMKM	Rp 123,46 triliun
3.	Rangsangan dan insentif perpajakan	Rp 120,61 triliun
4.	Talangan biaya BUMN	Rp 44,57 triliun

5.	Dukungan K/L	Rp 97,11 triliun
----	--------------	------------------

Secara detail, besar pendanaan dari program pemulihan tersebut terdiri dari pengalihan anggaran program social safety net sebanyak Rp 203,9 triliun, pengalihan dukungan UMKM dengan jumlah hingga Rp 123,46 triliun, pengalihan rangsangan dan insentif perpajakan Rp 120,61 triliun, sampai talangan biaya BUMN sebanyak Rp 44,57 triliun dan dukungan K/L hingga Rp 97,11 triliun. Pengistilahan PEN, ialah persoalan mengenai bagaimana menerangkan terhadap publik. Seharusnya jika memang subsidi ya sebut saja sebagai subsidi, tetapi jika ini telah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional, jika benar-benar dialihkan untuk menangani kejadian *extraordinary* yang berhubungan dengan pandemi, selain keperluan reguler semacam subsidi-subsidi yang merupakan pengeluaran rutin atau masuk dalam pos belanja APBN. Dengan begitu, pemerintah sebenarnya tidak benar-benar harus memakai istilah lain yang bisa membingungkan masyarakat. Alokasi anggaran ini merupakan trobosan yang beresiko bagi kestabilan perekonomian nasional, akan tetapi langkah ini merupakan langkah yang cukup tepat untuk menangani permasalahan semacam ini.

E. Pembangunan Kesehatan Nasional

Sebelum pandemi sampai di Indonesia, masalah kesehatan sudah terlebih dahulu berkembang sebagai wacana dari masa ke masa terkait pada sektor politik. Tak merasa ganjil jika selanjutnya, topik tentang kebutuhan primer, seperti kesehatan dan pendidikan selalu menjadi janji politik dalam proses elektoral pemilihan wakil rakyat. Masyarakat menaruh mimpinya pada mekanisme politik untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya, meski seringkali tidak sesuai dengan harapan. Rancangan di masa kampanye selalu menjadi polemik karena berbeda dengan janji yang diaktualisasikannya. Sebenarnya permasalahan terbesarnya ialah pada kemauan dan kesadaran politik. Pandemi datang dengan ancaman kehilangan nyawa, dalam rentang waktu yang singkat ditambah tingkat penularan kasus yang cepat. Wabah ini bersifat menyeluruh, dalam cakupan yang sangat luas sehingga istilah pandemi ditempelkan pada serangan virus corona ini.

Kita harus mulai membuat gambaran untuk siap siaga ketika berhadapan dengan

pandemi selanjutnya. Jika tidak memiliki sistem kekebalan yang kuat, maka pandemi bisa menciptakan sebuah iklim baru bagi manusia dari perulangan bencana kemanusiaan. Pandemi membentuk ruang seleksi alam (survival of the fittest) jika kita tidak dapat menyiapkan strategi dan skenario terbaik dalam menghadapinya. Pasti alur cerita pandemi akan menjadi berbeda, apalagi jika kita sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan paling buruk dari adanya wabah di masa yang akan datang. Jauh sebelum Covid 19 merebak, sistem kesehatan negara kita sudah harus dihadapkan dengan masalah defisit pembiayaan BPJS Kesehatan, sehingga kondisi itu berpeluang menjadi halangan bagi keberlangsungan program. Kehadiran BPJS Kesehatan merupakan perwujudan yang konkret atas usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap warga negaranya. BPJS Kesehatan menghadapi masalah yang menyangkut keberlangsungan hidup seseorang, tak hanya untuk penggunaannya, tetapi juga bagi keberlanjutan acara kesehatan nasional tersebut. Problematika yang berhubungan dengan mutu hidup manusia ini harus bisa diuraikan agar dapat mewujudkan dimensi kenaikan kualitas penduduk secara nasional. Tarik ulur kepentingan kesehatan dan pilihan ekonomi, sebagaimana pandemi Covid-19, menampilkan belum sepenuhnya dalam memandang aspek kesehatan sebagai sebab utama vitalitas kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berpijak pada mutu sumber daya yang dimiliki manusia.

5. Kesimpulan/Conclusion

Bertolak dari pembahasan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pandemi virus covid 19 sampai saat ini belum juga usai, bahkan memiliki varian baru yang lebih ganas. Pandemi telah menjadi sebuah momok bagi kelangsungan pemerintahan di seluruh negara. Pemerintah Indonesia pada era pandemic dihadapkan dengan berbagai permasalahan mulai dari berkurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan, dan masalah neraca pembayaran. Dibutuhkan upaya serius dari pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga peningkatan mutu lingkungan hidup. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dampak pandemi yaitu melalui penataan ulang kebijakan pembangunan, reformasi sosial, percepatan pemulihan ekonomi melalui pariwisata dan UMKM serta

pembangunan kesehatan nasional. Pengalokasian anggaran belanja negara menjadi salah satu upaya yang efektif dalam memenuhi kebutuhan nasional.

6. Ucapan Terimakasih

Puji syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga paper ini dapat terselesaikan. Juga tidak lupa penulis mengirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat muslim ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Paper kami yang berjudul “Manuver Kebijakan Pembangunan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Pasca Pandemi” yang merupakan wujud keikutsertaan atas diselenggarakannya seminar nasional simposium AIPTM. Terwujudnya paper ini tak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Robby Darwis Nasution, S.IP. M.A. Selaku ka Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus dosen pembimbing dalam pembuatan paper simposium ini.

7. Daftar Pustaka

Kasna, I Ketut. 2021. Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi. *Jurnal Cakrawarti*, 04 (02): 103-113

Desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM dan Dunia Usaha Rampung, Pemerintah Terbitkan Aturan PP 23/2020. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. (Online), (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-desain-program-pemulihan-ekonomi-nasional-untuk-umkm-dan-dunia-usaha-rampung-pemerintah-terbitkan-aturan-pp-232020/>), diakses 16 Januari 2022.

Deni, Arianto. 2022. *Langkah Pemerintah Dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Terkait APBN*, (Online), (<http://jatim.telusur.co.id/detail/langkah-pemerintah-dalam-mempertahankan-laju-pertumbuhan-ekonomi-melalui-kebijakan-fiskal-terkait-apbn#>), diakses 16 Januari 2022.

Carolin, Shinta. 2021. *Perjuangan Membangkitkan UMKM Lokal Dikala Pandemi*,

(Online), (<https://drpm.umsida.ac.id/perjuangan-membangkitkan-umkm-lokal-dikala-pandemi/>), diakses 16 Januari 2022.

Hertanto, Yudhi. 2020. Tantangan Sistem Kesehatan Nasional Pasca Pandemi.

(Online),

(https://www.kompasiana.com/yudhihertanto/5f8e9d0fd541df633d1ffbb3/tantangan-sistem-kesehatan-nasional-pasca-pandemi?page=3&page_images=1), diakses 16 Januari 2022.